

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap hasil temuan penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi, maka dapat disimpulkan beberapa hal secara umum maupun khusus. Simpulan tersebut diuraikan sebagai berikut:

5.1.1 Simpulan Umum

Semakin berkembangnya zaman, terdapat tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan politik yang ideal dari partai politik. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tugas yang dilaksanakan oleh Partai Politik. Pendidikan politik seringkali mengabaikan proses rekrutmen kader partai, terdapat partai-partai yang memilih secara instan tokoh-tokoh yang memiliki elektabilitas tinggi untuk direkrut menjadi kader partai tanpa melalui proses pendidikan politik. Hal itu mendorong terjadinya diskriminasi dalam rekrutmen kader partai dan menghasilkan kader partai yang tidak paham akan visi dan misi perjuangan partai.

Pendidikan politik yang dilakukan oleh DPD PDI-Perjuangan fokus pada pengembangan kemampuan calon kader dari segi kognitif, afektif dan psikomotor untuk memahami visi dan misi partai, serta mampu mengimplementasikan hasil dari pendidikan politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan tidak adanya diskriminasi kandidasi yang sesuai dengan teori Pippa Noris, kader-kader partai yang dapat menyelesaikan secara sempurna pendidikan politik dan memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum hanya diperoleh oleh kader-kader dan tokoh masyarakat memiliki elektabilitas tinggi dan modal keuangan yang cukup untuk mengikuti pemilihan umum.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan tidak optimalnya pendidikan politik bagi kader partai politik dikarenakan adanya sistem politik

proporsional terbuka yang mengakibatkan adanya persaingan di internal partai, serta mengabaikan hasil dari pendidikan politik dan lebih cenderung melakukan kandidasi berdasarkan leektabilitas dan kekuatan modal.

Menariknya, walaupun calon kader PDI-Perjuangan menyadari hal itu, mereka tetap memiliki semangat untuk mengikuti pendidikan politik secara sungguh-sungguh untuk berproses dan mengembangkan diri sebagai kader PDI-P. Walaupun, masih banyak kader yang kurang mampu menangkap materi pendidikan politik, karena mengalami kesulitan untuk merealisasikan antara konsep yang diperoleh, dengan implementasi yang terjadi di masyarakat. Selain itu, adanya budaya masyarakat yang kurang mendukung menjadi faktor penghambat optimalisasi hasil pendidikan politik pada kader PDIP Jawa Barat.

5.1.2 Simpulan Khusus

- a. Pendidikan politik dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan oleh DPD PDI-P Jawa Barat. Pendidikan politik dilaksanakan setiap jenjang yang dilakukan secara berkala. Persoalan tidak idealnya pendidikan politik dalam proses rekrutmen adalah pengurus partai memiliki prioritas untuk membidik tokoh-tokoh yang diutamakan PDI-Perjuangan untuk menjadi kader yang mampu memenangkan kontestasi Pemilu dan Pilkada. Hal ini berdampak pada tidak semua kader partai, memiliki kesempatan untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai kader PDI-P di Pemilu dan Pilkada.

Pada kenyataannya pendidikan politik terstruktur yang dilaksanakan oleh DPD PDI Perjuangan dilakukan secara dialektis melalui diskusi antar peserta dengan pemateri. Ide pendidikan politik tersebut, dikembangkan oleh PDI Perjuangan disesuaikan dengan keadaan zaman dan berlandaskan filosofi pemikiran Bung Karno. Terkait dengan materi pendidikan politik yang diajarkan oleh PDI-P di Jawa Barat yaitu tentang penguatan tujuan partai, jalannya perjuangan partai, nasionalisme dan patriotisme, kepemimpinan manajemen dan organisasi, serta pengajaran nasionalisme.

- b. Kendala yang ada selama masa pendidikan politik adalah kader yang kurang bersemangat untuk terlibat dalam kegiatan politik. Selain itu, terdapat hambatan untuk terlibat dalam pendidikan politik, salah satunya adalah hambatan untuk mengetahui konten atau analisis yang disampaikan oleh pembicara. Salah satu penyebabnya adalah karena pengeras suara yang buruk dan tidak dapat dengan mudah didengar. Situasi ini berdampak pada reputasi PDI-P yang dinilai oleh sejumlah kader tidak mampu memberikan pendidikan politik yang maksimal bagi kader partai.
- c. Dampak pendidikan politik yang dilaksanakan oleh PDI-P Jawa Barat, terjadi perubahan dalam diri peserta kaderisasi yaitu dari segi kognitif, afektif dan psikomotor. Perubahan kognitif ditandai dengan adanya pengetahuan baru soal kenegaraan dan kebangsaan, perubahan afektif ditandai dengan munculnya rasa nasionalisme dan perubahan psikomotor yaitu adanya keinginan peserta kaderisasi untuk bermanfaat bagi masyarakat. Dampak perubahan yang dirasakan oleh peserta kaderisasi mampu menjadi pondasi bagi kader PDI-P Jawa Barat untuk bisa mengimplementasikan visi dan misi di masyarakat.
- d. Terdapat dua faktor yang memungkinkan partai untuk memaksimalkan pendidikan politik yaitu: *pertama*, dengan menginternalisasikan tujuan dan misi Partai, karena setiap anggota dapat memiliki rasa tanggung jawab untuk mengemban pendidikan politik dengan lebih serius ketika mereka paham akan tujuan dan misi partai. *Kedua*, meningkatkan perencanaan pendidikan politik agar dalam implementasi pendidikan dapat terarah dan terukur. Solusi tersebut ditujukan tidak hanya untuk meningkatkan situasi internal PDI-Perjuangan, tetapi juga secara lebih umum untuk meningkatkan kesadaran publik tentang nilai pendidikan politik. Pasalnya, mereka yang lulus menjadi kader PDI-P bisa terjun langsung ke masyarakat untuk menegakkan visi dan misi PDI-P.

5.2 Implikasi

Penelitian mengenai dampak pendidikan politik bagi kader partai menunjukkan beberapa hasil penelitian yang menjadi implikasi secara teoritis, yaitu pendidikan politik di era modern tidak bisa lagi dilakukan dengan metode-metode kaderisasi yang kaku. Eksplorasi materi kebangsaan perlu lebih diperbaharui, sehingga para kader partai memiliki wawasan luas dalam menghadapi era modern. Pendidikan politik berdasarkan hasil penelitian sudah memunculkan kesadaran baik di kalangan pengurus maupun peserta bahwa pendidikan politik merupakan aspek yang sangat penting dalam proses kaderisasi partai politik. Kader-kader partai yang diajukan menjadi calon anggota legislatif maupun eksekutif tanpa melalui pendidikan politik partai dianggap sebagai kader yang tidak akan mampu menterjemahkan visi dan misi partai. Sehingga, partai politik perlu mengedepankan kader-kader yang sudah lama mengurus partai politik.

Implikasi praktis juga berdampak pada perlunya partai politik memiliki materi yang baku dan menciptakan terobosan-terobosan dibidang kebangsaan dengan tujuan untuk memperkokoh integrasi bangsa. Hal ini akan berakibat pada kuatnya demokrasi di Indonesia yang menjamin kedamaian dan ketentraman. Selain itu, partai politik perlu membuat suatu branding untuk meningkatkan elektabilitas kader partai, baik dengan dukungan media maupun dukungan kader partai ditingkat bawah, sehingga mesin partai dapat mengoptimalkan peran dan fungsinya sebagai wadah pendidikan politik masyarakat.

Partai politik penting untuk membuat suatu rangkaian dimulai dari proses pendidikan politik sampai pada proses kandidasi secara terstruktur dan berkesinambungan. Hal itu merupakan upaya untuk menyempurnakan pendidikan politik bagi kader. Bila kondisi tersebut dapat terealisasikan, maka citra partai politik sebagai media pendidikan politik dapat dilaksanakan dengan baik dan mengurangi citra partai politik yang bersifat kartel.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, pada bagian ini akan dirumuskan beberapa rekomendasi berkaitan dengan Pendidikan politik dari kader partai politik. Rekomendasi yang dimaksud ditujukan kepada beberapa pihak yang memiliki perhatian yang besar guna memaksimalkan Pendidikan politik bagi kader partai politik.

5.3.1 Partai Politik

Partai politik perlu dengan serius melakukan pendidikan politik secara berkelanjutan dan berkesinambungan selama melaksanakan pendidikan politik bagi kader. Perlu ada materi yang tetap dan materi yang dinamis sesuai zaman. Partai politik perlu mengalokasikan dana yang cukup untuk mendanai pendidikan politik. Partai politik perlu mengedepankan kader yang menjadi peserta terbaik selama proses kaderisasi untuk diproyeksikan menjadi anggota legislatif maupun eksekutif.

5.3.2 Masyarakat

Masyarakat perlu memiliki kesadaran bahwa tindakan yang dilakukan oleh partai politik tidak hanya bersifat materi, akan tetapi juga bisa bersifat immateri. Masyarakat perlu memberikan dukungan, sekaligus penilaian terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kader partai politik.

5.3.3 Pemerintah

Perlu ada inisiatif dari pemerintah untuk melakukan perubahan sistem politik dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Kondisi ini lebih memungkinkan untuk tidak terjadinya kader partai yang hanya memiliki elektabilitas dan modal yang besar.

5.3.4 Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini hanya fokus pada satu partai politik yaitu DPD PDIP Jawa Barat. Untuk penelitian selanjutnya, butuh baik melakukan perbandingan dengan antara partai nasionalis dan partai yang berbasis pada agama. Selain itu juga, perlu bagi peneliti selanjutnya melakukan perbandingan dengan pendidikan politik bagi kader partai di negara-negara lain. Hal itu akan lebih menambah wawasan untuk mengembangkan keilmuan pendidikan politik.